

PERANAN DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN DALAM PEMBANGUNAN JALAN DI KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA

Muhammad Bahrul Ulum¹

Abstrak

Muhammad Bahrul Ulum, Peranan Dinas Bina Marga dan Pengairan Dalam Pembangunan Jalan Di Kecamatan Palaran Kota Samarinda, di bawah bimbingan yang saya hormati Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Muhammad Jamal Amin, M.Si selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan dinas bina marga dan pengairan kota samarinda dalam melaksanakan pembangunan jalan di kecamatan palaran, dan untuk mengidentifikasi kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui wawancara dengan informan dan dari arsip, dokumen-dokumen serta data-data yang ada. Fokus penelitian skripsi ini mengenai peranan dinas bina marga dan pengairan dalam pembangunan jalan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengarahannya dan pengawasan serta kendala – kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan di kecamatan palaran kota samarinda. Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa dinas bina marga dan pengairan kota samarinda telah melaksanakan segala tugas dan kewajibannya pekerjaannya dengan baik, mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi pembangunan peningkatan jalan di kecamatan palaran kota samarinda, adapun kendala – kendala yang di hadapi diantaranya adalah masih terbatasnya anggaran dana yang diperoleh di karenakan masih banyaknya kawasan yang masih membutuhkan akses jalan yang baik untuk mendukung kemajuan daerahnya masing – masing, sedangkan factor pendukungnya yaitu partisipasi masyarakat yang begitu antusias dengan harapan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Dinas Bina Marga dan Pengairan, pembangunan, jalan

Pendahuluan

Kecamatan Palaran merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian selatan kota samarinda menjadi salah satu kecamatan terluas kedua setelah kecamatan samarinda utara. Kecamatan palaran digadang-gadang akan menjadi kawasan Samarinda baru yang memang sudah menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang pemerintah kota samarinda. Dengan perkembangan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: muhammadbahrul@gmail.com

pembangunan yang dimulai dengan pembangunan stadion utama kaltim dan pelabuhan peti kemas palaran serta proyek-proyek lainnya yang proses pembangunannya belum selesai secara menyeluruh, seperti pembangunan jalan tol, jembatan mahkota dan jalan-jalan penghubung lainnya yang mempunyai peranan penting yang dapat berpengaruh kepada berbagai aktivitas masyarakat seperti perdagangan barang dan jasa, pendidikan, perkantoran, dan permukiman. Dengan skala yang cukup besar, ternyata sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan pergerakan lalu-lintas di kecamatan palaran.

Dengan kondisi intensitas aktivitas yang tinggi disepanjang ruas jalan, ditambah lagi dengan bercampurnya pergerakan volume kendaraan umum dan pribadi yang sangat tinggi menyebabkan ruas jalan yang ada mengalami peningkatan beban dan menurunnya tingkat pelayanan jalan, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan lalu-lintas yang dapat mengakibatkan lumpuhnya aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota samarinda dalam mewujudkan cita-cita dari Kota Samarinda sebagai kota yang tertib, rapi, aman, dan nyaman.

Untuk mengimbangi jumlah penambahan penduduk yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pengembangan dan pemeliharaan sarana infrastruktur terutama jalan pun terus dilakukan dari waktu ke waktu secara bertahap.

Sebagai komitmen dari Pemerintah Republik Indonesia untuk terus membangun dan mengembangkan wilayah di seluruh Indonesia, maka melalui Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga terus berupaya untuk mewujudkan peningkatan sarana infrastruktur jalan yang dari waktu ke waktu semakin baik seiring dengan pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat. Salah satu pembangunan infrastruktur yang terus dikembangkan adalah pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bagian kegiatan di kecamatan Palaran.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Menurut Veithzal Rivai (2006:148) Peran dapat diartikan sebagai “Perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu”. Pemimpin di dalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan berjalan seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Adi Gunawan (2003:369) mengatakan bahwa “Peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.” Serta di dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2004)

menegaskan bahwa “Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.”

Soerjono Soekanto (2007:212) mengemukakan definisi peran / role merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Hal ini berarti peran menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan (h. 1430. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang dihasilkan.

Organisasi

Menurut Ignasius Wursato (2003) “Organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama antara sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu guna mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama.”

Setiap organisasi mempunyai fungsi, fungsi pengorganisasian berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasianpun harus direncanakan. Pengertian pengorganisasian dan organisasi berbeda. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamis, sedangkan organisasi adalah merupakan suatu alat atau wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan pembagian-pembagian pekerjaan kepada karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan.

Pembangunan

Gunnar Myrdal (1957) yang dikutip oleh Mudrajad Kuncoro (2003:9) ”Pembangunan sebagai pergerakan keatas dari seluruh sistem sosial, Sehingga pembangunan dipandang perubahan menyeluruh ke arah yang lebih baik.”

Ginandjar Kartasmita (1996), mengatakan bahwa ”Hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan.” Ginandjar Kartasmita (1996) juga mengatakan”Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreatifitas, disiplin, profesionalisme serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta kemampuan manajemen.” Sedangkan menurut Bachtiar Effendi (2002) yaitu ”Pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang ada secara terencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan.”

Tujuan Inti Pembangunan

Pembangunan merupakan sebuah kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi praktek sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Apapun komponen spesifik atas "kehidupan yang serba lebih baik" itu bertolak belakang pada tiga nilai pokok, yaitu (Todaro, 2000:145) :

- a. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.
- b. Jati diri menjadi manusia seutuhnya.
- c. Kebebasan dari sikap menghamba, kemampuan untuk memilih.

Adapun proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup
- b. Peningkatan standar hidup
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu bangsa serta bangsa secara keseluruhan

Jalan

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) pada butir ke 3 (tiga) sampai dengan ke 10 (sepuluh) menerangkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda

Peraturan Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda dijelaskan pada Bab III tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota

Samarinda dibagian kesembilan Paragraf 1 , Kedudukan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda Pasal (35), yaitu :

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan.
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekda.

Pada paragraf 2 Tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda , Pasal (36) yaitu :

Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan.

Di Paragraf 3, Fungsi Dinas Bina Marga dan Pengairan , Pasal (37) dijelaskan: Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal (36) diatas, Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya urusan bina marga dan pengairan serta jasa konstruksi jalan dan jembatan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bina teknik;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kebinamargaan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengendalian banjir;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan sumber daya air;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4, Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda, Pasal 38, yaitu :

Susunan Organisasi SKPD Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program.
3. Bidang Bina Teknik membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan dan Bimbingan Teknik;
 - b. Seksi Pengujian, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelayakan.
4. Bidang Bina Marga membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
5. Bidang Pengendalian Banjir membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Drainase;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sistem Darainase; dan
 - c. Seksi Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahkan :
 - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sistem Irigasi dan Bangunan Air;
 - b. Seksi Pemeliharaan Sistem Irigasi dan Bangunan Air; dan
 - c. Seksi Bina Manfaat.

Peranan yang dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda sejalan dengan tugas pokok dan fungsi instansi ini.

Tugas Pokok

1. Menurut peraturan daerah No. 5 Tahun 2001, tanggal 23 february 2001 tentang “Pembentukan susunan organisasi dinas bina marga dan pengairan kota samarinda.” Bahwa tugas pokok dari Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Bina Marga dan Pengairan.

Fungsi

1. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 05 Tahun 2001, sebagai berikut :
 - a. Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang pekerjaan umum Bina Marga dan Pengairan yang meliputi pengairan, jalan, sarana dan prasarana.
 - b. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan, jembatan, dan drainase dalam wilayah kota.
 - c. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan operasi rehabilitasi, peningkatan serta pemeliharaan dan pembangunan bidang pengairan, jalan, sarana dan prasarana.
 - d. Perencanaan pembangunan penyeberangan-penyebrangan jalan.

- e. Pengelolaan perijinan, pengamanan dan pemantauan air serta rekomendasi perijinan penambangan galian golongan C pada alur sungai.
- f. Pengelolaan perijinan, pemantauan, dan pemanfaatan jalan, sarana dan prasarana, permukiman dan pengembangan wilayah tata ruang dan tata kota wilayah wilayah daerah atau kota dalam lingkup Bina Marga dan Pengairan.
- g. Pelaksanaan penanggulangan bencana banjir dan bencana alam lainnya, serta usaha-usaha pengendalian erosi dan abrasi local daerah atau kota.
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketata laksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- i. Pengelolaan cabang dinas dan unit pelaksanaan teknis pada Dinas Daerah (UPTD).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang di teliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Menurut Rachmat Kriyanto (2006) “Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta dan sifat populasi atau obyek tertentu.”

Fokus Penelitian

1. Peranan Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam upaya pelaksanaan peningkatan pembangunan jalan yang nyaman dan strategis di Kecamatan Palaran, antara lain:
 - a. Perencanaan pembangunan peningkatan jalan di Kecamatan Palaran kota samarinda.
 - b. Penganggaran dana yang di perlukan dalam pembangunan peningkatan jalan di kecamatan palaran kota samarinda.
 - c. Pelaksanaan Pembangunan peningkatan jalan di kecamatan palaran kota samarinda.
 - d. Pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan di kecamatan palaran oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda.
2. Kendala – kendala yang dihadapi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam pelaksanaan pembangunan peningkatan jalan di kecamatan palaran kota samarinda, baik berupa kendala eksternal maupun internal.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan informan penelitian melalui observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian, Sugiyono (2006).

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library research)
2. Penelitian Lapangan (Field work research)
 - a. Pengamatan
 - b. Dokumen
 - c. Wawancara

Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

Hasil Penelitian

Peranan Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan palaran kota samarinda

Menurut hasil wawancara dan hasil penelitian diketahui bahwa, meningkatnya harga tanah mengakibatkan tersebarnya lokasi permukiman jauh dari kota atau bahkan sampai keluar kota yang tidak tercakup oleh jaringan layanan umum dengan dibukanya jalan baru dan peningkatan jalan yang sudah ada semakin merangsang penggunaan angkutan pribadi maupun umum. Sesuai dengan semakin berkembangnya Kecamatan Palaran, maka aspek dari tingkat perkembangan kecamatan dengan segala kegiatannya, yaitu meningkatnya volume arus lalu-lintas kendaraan baik dari segi kapasitasnya maupun bentuk karakteristiknya. Dari sistem jaringan jalan di kecamatan Palaran dengan lebar jalan yang ada lebih mudah dan nyaman masyarakat bisa melintasinya, karena Kecamatan Palaran merupakan Kecamatan yang sedang berkembang dengan segala aktifitas masyarakatnya yang dominan bekerja sebagai pegawai swasta, sehingga tidak terjadi kemacetan arus lalu lintas dikawasan jalan utama Palaran dan tidak menyebabkan masalah pada jam-jam sibuk kerja, sekolah dan lain-lain.

Penganggaran dana yang di perlukan dalam pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan palaran kota samarinda

Menurut hasil wawancara dan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran untuk pembangunan jalan setiap daerah telah ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB) Kota Samarinda yang diberikan kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan. Proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana mengacu pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dimana volume pekerjaan tercantum didalam RAB. Namun dari segi anggaran yang disusun Dinas Bina Marga dan Pengairan anggaran yang diterima masih sangat terbatas,

dikarenakan masih banyaknya daerah – daerah terisolir yang memerlukan akses jalan untuk kemajuan daerahnya tersebut.

Pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan di Kecamatan palaran

Peranan Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam pembangunan jalan di Kecamatan Palaran Kota Samarinda melalui pengawasan dan pengendalian diketahui bahwa kualitas kegiatan proyek dapat selalu dipantau dan dapat dilihat dari rumusannya yang penulis peroleh melalui wawancara dengan beberapa informan berikut hasilnya:

Dalam pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dilakukan penyederhanaan pada masa yang akan datang pekerjaan perencanaan dilaksanakan oleh Kota/Kabupaten. Dasar penyederhanaan ini adalah metode dan prosedur perencanaan teknis yang telah di tentukan SNI dan Direktorat Jenderal Bina Marga Pusat. Dalam perencanaan teknis sederhana yang dihasilkan yaitu : berdasarkan kebutuhan lalu-lintas, teknologi yang digunakan sesuai dengan keadaan setempat baik secara fisik sesuai keadaan dan situasi, serta dilaksanakan dalam keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

Pemantauan dan evaluasi proyek-proyek Dinas Bina Marga dan Pengairan

Menurut hasil penelitian dapat diketahui bahwa, didalam Pemantauan dan evaluasi Dinas Bina Marga dan Pengairan melakukan kontrol yang bertujuan memastikan kembali apakah pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana telah sesuai dengan keadaan, mutu dan kualitas pengerjaan yang sudah ditentukan, selain itu Dinas Bina Marga dan Pengairan juga menjadi monitoring pelaksanaan dilapangan secara langsung. Evaluasi yang lain juga yaitu berupa kegiatan pemeriksaan kelengkapan administrasi, progress pekerjaan perminggu, laporan harian, laporan bulanan, lalu back up volume, serta kegiatan dalam setiap bulan selalu ada dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan didalamnya terdapat kendala, permasalahan dan pemecahannya jika ternyata sampai akhir tahun masih bermasalah akan kembali mencari pemecahan masalahnya.

Setiap petugas memantau dan mendeteksi kerusakan penyebabnya dan cara-cara perbaikan seperti:

- 1) Kerusakan akibat pekerjaan awal,
- 2) Kerusakan akibat pemakaian dan waktu,
- 3) Kerusakan akibat penyebab khusus.

Kegiatan rutin untuk mempertahankan bangunan fisik yang ada agar tetap dapat berfungsi seperti yang direncanakan.

Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam pembangunan jalan di kecamatan palaran Kota Samarinda ***Anggaran***

Menurut hasil wawancara dan hasil penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam menjalankan berbagai program pembangunan jalan terjadi pada realisasi anggaran. Hal ini merupakan kendala yang bisa terjadi disetiap pengusulan anggaran, sehingga tersendat-sendatnya program pembangunan jalannya.

Dengan melihat upaya Dinas Bina Marga dan pengairan ini dapat dikatakan sekalipun realisasi anggaran tidak sesuai dengan usulan, upaya pembangunan jalan tidak berhenti hanya karena anggaran.

Pembebasan lahan

Menurut hasil penelitian dapat di ketahui bahwa sebelum pembebasan lahan di lakukan Dinas Bina Marga dan Pengairan mencari tahu luas lahan yang diperlukan. Pembebasan lahan ternyata menjadi kendala dalam perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan dikarenakan pembebasan lahan ini memerlukan waktu dan anggaran yang besar dan lama.

Partisipasi masyarakat

Menurut hasil wawancara dan hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Palaran di jalan Melati dan jalan HB. Suparno yang menghubungkan Jalan Raya (Ampera), Pasar dan jalan Parikesit, adi sucipto. Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan maupun peningkatan jalan tersebut karena akan memudahkan akses lalu lintas dan banyaknya peluang untuk memacu ekonomi maupun lapangan pekerjaan di kecamatan palaran.

Penutup

Kesimpulan

1. Dengan adanya Pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan palaran yang meliputi jalan lingkungan, telah menjadi terobosan baru untuk melengkapi dan meningkatkan sistem jaringan jalan dan transportasi yang telah ada, hal ini terlihat dari sistem pembangunan dan peningkatan jalan tersebut. Tentu hal ini bertujuan untuk memperlancar arus transportasi, mengurangi tingkat kecelakaan dan juga menjadi penghubung yang mampu membuka daerah-daerah yang terisolasi akibat kondisi jalan yang belum ada ataupun kurang memadai keadaanya.
2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan Dinas Bina Marga dan Pengairan melalui seksi pengujian, monitoring dan evaluasi. Pengawasan dan pengendalian dalam hal ini dilaksanakan demi tercapainya hasil pekerjaan yang sesuai dengan standard dan sesuai dengan biaya anggaran yang telah di tetapkan dalam perencanaan
3. Penganggaran dana merupakan hal yang penting dan paling mendasar dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan palaran dapat terlaksana. Anggaran dana untuk pelaksanaan

kegiatan tersebut telah disusun berdasarkan Rencana Strategis dan ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.

4. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan di kecamatan palaran yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dilakukan sebagai upaya untuk menjaga dan mengamati kualitas teknis pekerjaan terhadap perkembangan yang terjadi dari peranan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda dalam mengupayakan pembangunan jalan pengujian dan pemeriksaan sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan fisik maupun dalam bentuk laporan tertulis yang akan dikerjakan dan telah dikerjakan.
5. Anggaran dana dalam pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan selalu diusulkan setiap tahun oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan, karna melihat kondisi jalan baru maupun jalan yang sudah ada di daerah-daerah masih sedikit dan relative tidak memadai kondisinya. jika dalam realisasi anggaran tidak sesuai dengan usulan yang diajukan, maka Dinas Bina Marga dan Pengairan lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk jangka pendek dan jangka menengah. Selain itu, dengan anggaran yang terbatas pula Dinas Bina Marga dan Pengairan menjadikan kegiatan tersebut program proyek multiyears jika ternyata dalam perencanaan kegiatan tidak dapat terselesaikan maka akan dianggarkan ditahun mendatang.
6. Partisipasi masyarakat sangat antusias membantu Pemerintah untuk membuka maupun meningkatkan jalan baru sehingga akses jalan tersebut bisa memberi peluang ekonomi makro. lebih lanjut instansi Dinas Bina Marga dan Pengairan juga melakukan sosialisasi dengan pihak Kecamatan, Lurah, RT dan warga setempat untuk meminta dukungan dan kerja samanya agar program pembangunan dan peningkatan jalan di Kecamatan Palaran dapat terlaksana tanpa kendala-kendala di lapangan.

Saran

1. Perlunya pembangunan dan peningkatan jalan untuk mengatasi gangguan lalu-lintas, mempertahankan kualitas lingkungan serta meningkatkan mobilitas dan kemudahan aksesibilitas di wilayah lingkungan Kecamatan Palaran.
2. Salah satu dampak yang didapat dari pembangunan dan peningkatan jalan dikawasan ini adalah meningkatnya perkembangan daerah, hal ini dinilai akan memberi dampak positif karena investor akan semakin tertarik menanamkan modalnya. Setelah sarana terbangun memungkinkan investor tidak akan ragu lagi menanamkan modalnya. Ini yang akan memberi banyak perubahan pada perekonomian, pertumbuhan, lapangan pekerjaan dan tentunya penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika kajian dan studi mendalam memberikan pandangan pembangunan sarana ini sangat mendesak, maka penggunaan dana publik pantas

dilakukan, APBD atau APBN berkewajiban memberi peluang daerah mengembangkan potensinya.

3. Dan juga didalam pembebasan lahan untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan sebaiknya dapat dilakukan dengan baik dan dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Daftar Pustaka

- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Cetakan Pertama. PT. Ohaido dan Offset. Jakarta.
- Gunawan, Adi. 2003. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Kashiko. Surabaya.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Lidesindo. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Miles, Matthew B dan Huberman A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.
- Rivai, Veithzal. 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang.P. 1994. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat*. Bharata. Jakarta.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Edisi Revisi. CV. Alfabeta. Bandung.
- Soerjono Soekanto; 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, Rajawali Pers Jakarta
- Wursanto, Ignasius. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, ed.II, Andi. Yogyakarta. 2003

Dokumen-dokumen :

- Peraturan Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda*.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 023 Tahun 2008 *Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Samarinda*
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2010 *Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan Pemerintah Daerah Kota Samarinda*

Sumber Internet:

- Martini, Lilis. 2012. *Fungsi-fungsi organisasi*.
<http://lilismartini.blogspot.com/2012/10/fungsi-fungsi-organisasi.html>.
Diakses tanggal 20 November 2015.